



Analisis Perkembangan Pendapatan Daerah dan Infrastruktur Jalan dalam Mendukung Pembangunan di Daerah Otonomi Baru: Studi Kasus di Kabupten Buton Selatan

Mirad¹, Lapipi², Hasddin³, Tri Astuti⁴, Alfian Ishak³, Osu Oheoputra Husen³

¹Universitas Mandala Waluya Kendari, Kendari, Indonesia

²Universitas Halu Oleo, Kendari, Indonesia

³Universitas Lakidende, Unaaha, Indonesia

⁴Universitas Muhammadiyah Buton, Baubau, Indonesia

*Korespondensi: laodemirad22.kendari@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perkembangan pendapatan daerah Kabupaten Buton Selatan periode 2016–2022 berdasarkan sumber pendapatan dan faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan dan pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, penelitian ini mengevaluasi kondisi infrastruktur jalan di wilayah ini dan dampaknya terhadap efisiensi ekonomi, konektivitas antardaerah, dan peluang investasi yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dan kualitatif, penelitian ini menganalisis data sekunder dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), Badan Pusat Statistik (BPS), dan dokumen instansi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan daerah masih didominasi oleh dana perimbangan dengan kontribusi rata-rata 79,77%, sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) relatif kecil, meskipun mengalami peningkatan sebesar 4,82% pada tahun 2022. Ketergantungan yang tinggi terhadap transfer pusat mengindikasikan perlunya strategi diversifikasi sumber pendapatan untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah. Dari sisi infrastruktur, panjang jalan mengalami penurunan signifikan sebesar 24,55 km pada tahun 2021–2022, yang dapat menghambat konektivitas dan pertumbuhan ekonomi. Meskipun telah dilakukan perbaikan jalan, namun perbaikan kualitas jalan masih mengakibatkan beberapa ruas jalan mengalami kerusakan, sehingga diperlukan kebijakan pemeliharaan yang lebih efektif. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan rekomendasi strategis dalam mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah dan perbaikan infrastruktur untuk mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan di Kabupaten Buton Selatan.

SEJARAH ARTIKEL

Diterbitkan 30 Desember 2024

KATA KUNCI

Infrastruktur Jalan; Otonomi Baru; Pembangunan Daerah; Pendapatan Daerah

1. Pendahuluan

Pemerintah daerah memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu aspek krusial dalam pelaksanaan pembangunan daerah adalah tersedianya pendapatan asli daerah yang cukup untuk membiayai berbagai program dan kebijakan yang dirancang. Pendapatan daerah dapat dikategorikan menjadi tiga sumber utama, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan sumber pendapatan lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah). Pendapatan daerah yang stabil dan berkelanjutan merupakan faktor utama dalam menciptakan pemerintah daerah yang mandiri secara finansial, sehingga dapat mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat dan mempercepat proses pembangunan daerah.

Di Kabupaten Buton Selatan, PAD diperoleh dari berbagai sumber, antara lain pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan sumber lain yang sah. Sementara itu, dana perimbangan meliputi Dana Bagi Hasil (DBH) dari pajak dan sumber daya alam yang bersumber dari pemerintah pusat dan provinsi, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Selain itu, sumber pendapatan lain dapat bersumber dari hibah, dana darurat, dana bagi hasil pajak dari provinsi ke kabupaten, dana penyesuaian dan otonomi, serta bantuan dari pemerintah kabupaten lainnya apabila tersedia. Dengan berbagai sumber pendapatan tersebut, tantangan utama yang dihadapi adalah bagaimana mengoptimalkan pendapatan asli daerah dan memanfaatkannya secara efisien untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

Dalam konteks daerah otonomi baru (DOB), seperti Kabupaten Buton Selatan, dinamika pendapatan daerah sering kali berfluktuasi, dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kebijakan fiskal, kondisi ekonomi daerah, dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah. Ketergantungan yang tinggi terhadap dana perimbangan dapat menghambat kemandirian fiskal daerah dan menimbulkan risiko ketidakstabilan keuangan daerah. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang tepat dalam mengelola keuangan daerah agar dapat meningkatkan pendapatan secara mandiri dan mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat.

Selain aspek keuangan, infrastruktur wilayah, khususnya jaringan jalan, memiliki peran vital dalam mendukung mobilitas ekonomi masyarakat dan meningkatkan potensi pendapatan daerah. Infrastruktur jalan yang memadai dapat mempercepat distribusi barang dan jasa, mempermudah akses ke pasar, serta menarik investasi ke daerah tersebut. Kabupaten Buton Selatan sebagai daerah otonomi baru masih menghadapi tantangan dalam pengembangan infrastruktur transportasi yang memadai. Keterbatasan akses jalan yang baik dapat menghambat aktivitas ekonomi dan mengurangi efisiensi distribusi hasil pertanian, perikanan, serta produk-produk lokal lainnya.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji tentang perkembangan pendapatan daerah dalam konteks otonomi daerah. Misalnya penelitian yang dilakukan oleh Mardiasmo (2018) menunjukkan bahwa PAD di daerah otonomi baru cenderung masih bertumpu pada dana transfer dari pemerintah pusat, dengan kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah yang relatif kecil. Penelitian lain yang dilakukan oleh Putra & Hadi (2020) menegaskan bahwa optimalisasi pemanfaatan sumber daya lokal dan peningkatan kapasitas fiskal daerah merupakan faktor penting dalam meningkatkan kemandirian keuangan daerah. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati et al., (2021) menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas administrasi perpajakan daerah dan inovasi di bidang pendapatan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan PAD di daerah otonomi baru.

Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perkembangan pendapatan daerah di Kabupaten Buton Selatan dalam kurun waktu 2016-2022 berdasarkan sumber pendapatannya dan faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan dan pengelolaan keuangan daerah secara keseluruhan. Selain itu, penelitian ini juga akan mengevaluasi kondisi infrastruktur jalan di wilayah ini dan dampaknya terhadap efisiensi ekonomi, konektivitas antarwilayah, serta peluang investasi yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

2. Metode Penelitian

2.1 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif untuk menganalisis perkembangan pendapatan daerah Kabupaten Buton Selatan dalam kurun waktu 2016-2022. Penelitian deskriptif kualitatif sangat relevan dalam menganalisis perkembangan pendapatan daerah dan perkembangan infrastruktur wilayah (jalan) di Kabupaten Buton Selatan karena metode ini memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena secara mendalam berdasarkan data empiris tanpa memanipulasi variabel yang diteliti. Dalam konteks ini, penelitian deskriptif kualitatif akan digunakan untuk mengeksplorasi bagaimana pendapatan daerah dan infrastruktur jalan berkembang dari tahun ke tahun.

Menurut Sugiyono (2016), metode deskriptif kualitatif bertujuan untuk memahami kondisi alamiah objek, di mana peneliti berperan sebagai instrumen kunci dalam pengumpulan data. Dalam penelitian ini, pendekatan ini diterapkan dengan menganalisis laporan keuangan daerah, kebijakan fiskal, dan wawancara dengan pemangku kepentingan seperti pejabat pemerintah daerah, akademisi, dan ekonom.

Lebih lanjut, Hasddin et al., (2022) dan Mukhtar (2013) menyatakan bahwa penelitian deskriptif kualitatif dapat digunakan untuk mengidentifikasi pola dan tren suatu fenomena tertentu. Dalam konteks pendapatan daerah dan infrastruktur wilayah di Kabupaten Buton Selatan, metode ini memungkinkan peneliti untuk menggambarkan pola

perubahan PAD, dana perimbangan, dan sumber pendapatan lainnya secara sistematis dan mengidentifikasi tantangan utama dalam pengelolaannya. Termasuk dalam arahan dalam peningkatan kuantitas dan kualitas jalan sebagai pendukung kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.

Penelitian ini juga dapat mengungkap sejauh mana kebijakan fiskal efektif dalam meningkatkan pendapatan daerah dan bagaimana strategi pemerintah dalam mengoptimalkan sumber daya daerah untuk mengurangi ketergantungan pada dana perimbangan dari pusat. Dengan komparasi data sekunder, penelitian ini dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang peluang dan tantangan dalam meningkatkan kemandirian fiskal daerah, sebagaimana dijelaskan dalam penelitian (Putra & Hadi, 2020) dan pembangunan infrastruktur wilayah, khusus jalan sebagai saran vital bagi pembangunan (Zahra et al., 2024; Alius & Anis, 2024; Noviyanti & Putra, 2023; dan Hayati, 2022).

Dengan demikian, penelitian deskriptif kualitatif dalam analisis perkembangan pendapatan daerah di Kabupaten Buton Selatan tidak hanya mendeskripsikan data secara numerik tetapi juga menjelaskan konteks sosial ekonomi, kebijakan, dan faktor eksternal yang mempengaruhi pendapatan daerah, yang pada akhirnya dapat memberikan rekomendasi strategis bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan keberlanjutan dan kemandirian keuangan.

2.2 Data dan Analisis

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang diperoleh dari dokumen resmi seperti Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), Badan Pusat Statistik (BPS), serta dokumen dan laporan dari instansi terkait. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik statistik deskriptif untuk mengetahui kecenderungan dan pola pertumbuhan pendapatan daerah berdasarkan sumber pendapatannya.

Untuk menganalisis data, penelitian ini menggunakan teknik analisis statistik deskriptif. Statistik deskriptif merupakan suatu metode yang digunakan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul tanpa bermaksud untuk membuat simpulan yang berlaku umum atau generalisasi. Teknik ini melibatkan perhitungan nilai rata-rata (mean), simpangan baku, dan persentase untuk memahami sebaran dan tren data (Sugiyono, 2010). Dengan demikian, peneliti dapat mengidentifikasi pola pertumbuhan pendapatan daerah berdasarkan sumbernya, seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan sumber pendapatan lainnya. Analisis ini juga membantu dalam mengidentifikasi kontribusi masing-masing sumber pendapatan terhadap total pendapatan daerah dan mengamati perubahan yang terjadi selama periode penelitian.

Selain itu, analisis statistik deskriptif memungkinkan peneliti menyajikan data dalam bentuk tabel, grafik, atau diagram yang memudahkan pemahaman informasi yang disajikan (Ghozali, 2011). Dengan visualisasi data ini, pembaca dapat dengan mudah menafsirkan tren dan pola yang muncul dari data yang dianalisis.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Hasil

Sesuai dengan tujuan penelitian, bagian ini mengulas perkembangan pendapatan daerah di Kabupaten Buton Selatan dalam kurun waktu 2016-2022 berdasarkan sumber pendapatannya dan strukturnya yang memengaruhi pertumbuhan dan pengelolaan keuangan daerah secara keseluruhan. Ulasan berikutnya adalah menyajikan hasil analisis kondisi infrastruktur jalan di Kabupaten Buton Selatan dalam mendukung mendukung mobilitas sosial dan ekonomi masyarakat.

a. Perkembangan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan aspek krusial dalam mendukung pelaksanaan pembangunan dan keberlanjutan program di suatu daerah. Secara umum, pendapatan daerah dikelompokkan menjadi tiga sumber utama, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan sumber pendapatan lain yang sah, sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

Di Kabupaten Buton Selatan, PAD diperoleh dari beberapa komponen utama, antara lain pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan sumber lain yang sah. Sedangkan, dana perimbangan meliputi Dana Bagi Hasil (DBH) dari pajak dan sumber daya alam yang diterima dari pemerintah pusat dan provinsi, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Selain kedua sumber utama tersebut, terdapat pendapatan lain yang sah, yang dapat bersumber dari hibah (berupa barang, uang, dan/atau jasa), dana darurat, dana bagi hasil pajak

dari provinsi kepada kabupaten, dana penyesuaian dan dana otonomi, serta bantuan dari pemerintah kabupaten lainnya apabila ada.

Berdasarkan sumber-sumber pendapatan tersebut, berikut ini disajikan data perkembangan pendapatan daerah di Kabupaten Buton Selatan periode 2016–2022 seperti terlihat pada Tabel 1. Diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami fluktuasi selama kurun waktu 2016–2022, dengan peningkatan signifikan pada tahun 2018 (Rp25,86 miliar) dan tahun 2022 (Rp30,35 miliar). Sumber utama PAD, seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain pendapatan yang sah, menunjukkan tren yang beragam. Pajak daerah meningkat secara bertahap dari Rp1,06 miliar (2016) menjadi Rp3,01 miliar (2022). Retribusi daerah menunjukkan peningkatan yang signifikan, terutama pada tahun 2020 dan 2021. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan cenderung bervariasi, dengan peningkatan pada tahun 2020–2022 setelah menurun pada tahun 2018. Lain-lain pendapatan yang sah mengalami lonjakan drastis pada tahun 2018 (Rp22,49 miliar) dan tahun 2022 (Rp21,68 miliar), yang kemungkinan berasal dari sumber pendapatan baru atau peningkatan efisiensi pengelolaan.

Tabel 1. Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan Tahun 2016-2022

Sumber Pendapatan	Jumlah (Rp)						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	7.666.531.859	8.494.630.000	25.863.321.000	5.749.372.000	19.905.751.000	21.564.309.000	30.353.367.870
Pajak Daerah	1.067.000.000	1.440.000.000	1.629.805.000	1.441.000.000	1.983.595.000	2.293.960.000	3.014.360.486
Retribusi Daerah	557.250.000	1.759.250.000	1.125.056.000	793.425.000	2.600.984.000	3.368.690.000	3.116.361.110
Hasil Pengelolaan Kekayaan Alam Daerah yang dipisahkan	1.109.045.859	1.820.558.000	619.947.000	-	2.016.725.000	2.488.260.000	2.542.862.222
Lain yang Sah	4.933.236.000	3.474.822.000	22.488.513.000	3.514.947.000	13.304.447.000	13.413.399.000	21.679.784.052
Dana Perimbangan (Transfer)	424.354.759.730	483.260.781.000	484.914.269.000	483.260.781.000	472.089.248.000	477.362.715.000	528.008.280.892
Dana Bagi Hasil Pajak	6.946.175.000	8.054.074.000	6.785.188.000	8.054.074.000	4.563.258.000	5.398.475.000	7.955.996.412
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Pengolahan Sumber Daya Alam	4.289.480.000	4.459.918.000	9.304.946.000	4.459.918.000	18.590.279.000	18.299.257.000	86.653.008.014
Dana Alokasi Umum (DAU)	337.380.172.000	343.792.777.000	343.792.777.000	343.792.777.000	336.333.934.000	345.962.916.000	335.221.306.718
Dana Alokasi Khusus (DAK)	75.738.932.000	126.954.012.000	125.031.358.000	126.954.012.000	112.601.777.000	107.702.067.000	98.177.969.748
Lain-lain	134.475.000.000	120.662.288.000	65.854.606.000	73.275.765.000	126.048.048.000	142.811.736.348	71.780.675.000
Hibab (barang atau uang dan/atau jasa)	-	-	7.470.000.000	-	26.476.430.000	18.612.221.000	-
Dana darurat	-	-	-	-	-	-	-
Dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten	6.901.868.000	4.687.676.000	7.537.323.000	6.887.082.000	7.631.714.000	15.983.383.000	-
Dana penyesuaian dan dana otonomi	49.520.092.000	50.669.157.000	-	-	-	-	-
Dana dari bantuan pemerintah provinsi dan kabupaten lain	-	-	-	-	-	-	-
Dana Desa	39.120.731.000	49.520.092.000	50.847.283.000	50.847.283.000	61.807.546.000	62.349.953.000	50.027.957.000
Dana Insentif	-	-	-	-	30.132.358.000	28.612.758.000	3.140.497.000
Lainnya yang sah	38.932.309.000	15.785.363.000	-	15.541.400.000	-	17.253.421.348	18.612.221.000
Total (Rp)	556.496.291.589	612.417.699.000	576.632.196.000	556.536.546.000	618.043.047.000	641.738.760.348	630.142.323.762

Sumber:

1. APBD Kabupaten Buton Selatan dalam BPS Buton Selatan [Buton Selatan Angka 2023], (2023); dan BPS, Buton Selatan Angka 2020];
2. Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Buton Selatan Tahun 2016-2020 (Nurdin dkk., 2023);
3. Daftar Alokasi Dana Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2022, Kementerian Keuangan (2021); dan Tahun Anggaran 2021, Kementerian Keuangan (2020);
4. Perda Kabupaten Buton Selatan No. 2 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Buton Selatan Tahun Anggaran 2021
5. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Buton Selatan Tahun 2022
6. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Buton Selatan Tahun 2022

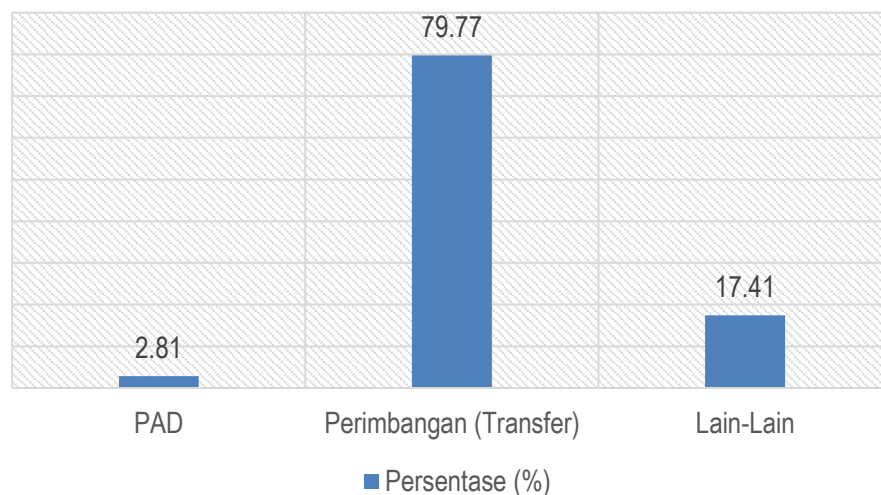
Dana perimbangan (Transfer) merupakan sumber utama pendapatan Kabupaten Buton Selatan dengan sumbangan terbesar setiap tahunnya. Pada kurun waktu tersebut, jumlah dana perimbangan mengalami fluktuasi, berkisar antara Rp424,35 miliar (2016) hingga Rp528,00 miliar (2022). Diketahui, Dana Bagi Hasil Perpajakan mengalami kenaikan dari Rp6,94 miliar (2016) menjadi Rp7,95 miliar (2022). Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam menunjukkan kenaikan yang cukup tajam pada tahun 2022, yakni mencapai Rp86,65 miliar dibanding tahun-tahun sebelumnya. Dana Alokasi Umum (DAU) relatif stabil, berkisar antara Rp335–345 miliar per tahun. Dana Alokasi Khusus (DAK) mengalami penurunan pada tahun 2022 menjadi Rp98,17 miliar dibanding tahun-tahun sebelumnya yang mencapai lebih dari Rp100 miliar.

Penerimaan dari sumber lain menunjukkan variasi yang signifikan, dengan lonjakan pada tahun 2020 (Rp126,04 miliar) dan 2021 (Rp142,81 miliar). Beberapa komponen utama dalam kategori ini antara lain Dana Desa yang meningkat dari Rp39,12 miliar (2016) menjadi Rp50,02 miliar (2022). Dana insentif yang muncul pada tahun 2020 dan 2021 mencapai Rp30,13 miliar dan Rp28,61 miliar. Dana lain-lain yang sah mengalami fluktuasi, dengan nilai tertinggi pada tahun 2021 sebesar Rp18,61 miliar.

Dilihat dari jumlah total Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan selama tahun 2016-2022 adalah fluktuatif. Pendapatan Pemerintah tertinggi terjadi tahun 2021, sedangkan terendah pada tahun 2016. Nilai rata-rata pendapatan daerah selama tahun 2016-2022 sebesar Rp 598.858.123.386/tahun. Data tersebut selengkapnya disajikan pada Gambar 1 berikut:

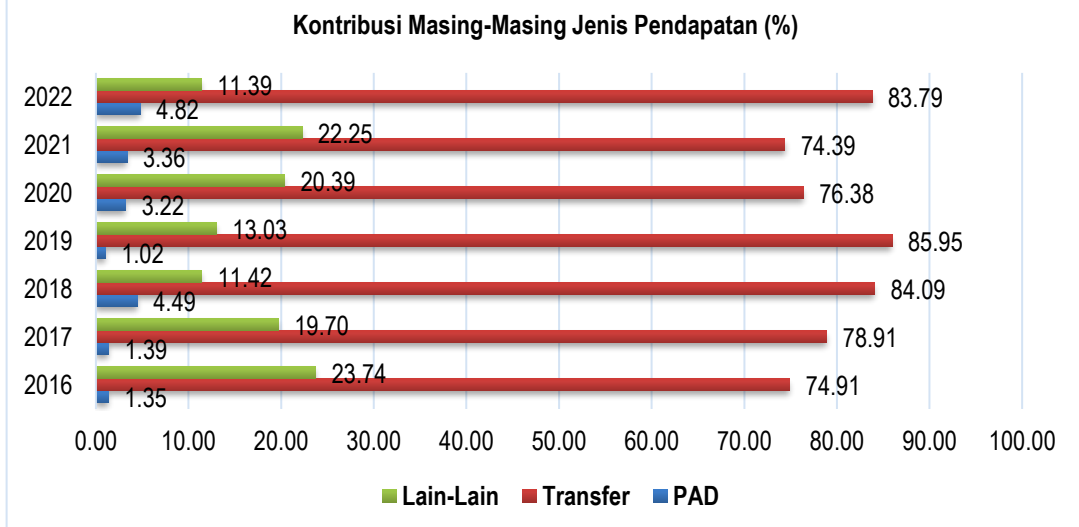


Berdasarkan data pendapatan daerah Kabupaten Buton Selatan selama kurun waktu 2016–2022, terlihat bahwa struktur pendapatan masih didominasi oleh dana perimbangan (transfer) dari pemerintah pusat dan provinsi. Rata-rata kontribusi pendapatan daerah menunjukkan bahwa dana perimbangan memberikan kontribusi sebesar 79,77% sehingga menjadi sumber utama pembiayaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah. Sementara itu, lain-lain pendapatan yang sah memberikan kontribusi sekitar 17,42%, meliputi hibah, dana desa, insentif, dan bantuan dari pemerintah provinsi dan kabupaten lainnya. Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki kontribusi yang relatif kecil, hanya 2,81%, yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan sumber lain yang sah. Adapun infografisnya disajikan pada Gambar 2 berikut.



Gambar 2. Kontribusi Rata-Rata Jenis Pendapatan Daerah di Kabupaten Buton Selatan Tahun 2016-2022

Selanjutnya, data pada Gambar 3 diketahui bahwa kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah tahun 2016 sebesar 1,35% (Rp 7,66 miliar), kemudian tahun 2018 menjadi 4,49% (Rp 25,86 miliar) atau mengalami kenaikan sekitar 3,13%. PAD tertinggi selama periode tersebut terjadi pada tahun 2022 dengan kontribusi sebesar 4,82%. Terjadi peningkatan realisasi PAD selama tahun 2016 ke tahun 2022 sebesar 3,46%.



Gambar 3. Struktur dan Kontribusi Pendapatan Daerah Menurut Jenis di Kabupaten Buton Selatan Tahun 2016-2022

Kontribusi dari sumber dana perimbangan (transfer) terhadap pendapatan daerah nampak fluktuatif dengan kecenderungan sedikit peningkatan. Hal ini dapat dilihat besaran kontribusinya tahun 2016 sebesar 74,91% kemudian tahun 2017-2019 mengalami peningkatan, tahun 2020-2021 menunjukkan penurunan. Tahun 2022 menunjukan perbaikan dengan sedikit mengalami peningkatan menjadi 83,79% akan tetapi masih lebih rendah dibanding capaian PAD tahun 2018 dan 2019 masing-masing 84,09% dan 85,95%.

Sumber lain-lain kontribusinya dalam pendapatan daerah relatif dinamis, akan tetapi memperlihatkan tren penurunan. Tahun 2016 kontribusinya sebesar 23,74% sebagai tertinggi hingga tahun 2022. Pendapatan sumber lain-lain tahun 2019 dan 2019 cukup baik, namun kemudian menurun menjadi 11,39% di tahun 2022.

b. Perkembangan Infrastruktur Wilayah (Jalan)

Infrastruktur wilayah suatu daerah, khususnya jaringan jalan, memegang peranan penting dalam mendorong pertumbuhan sosial dan ekonomi suatu daerah. Jalan sebagai sarana transportasi tidak hanya menghubungkan berbagai lokasi, tetapi juga menjadi faktor kunci dalam meningkatkan aksesibilitas, mobilitas, serta distribusi barang dan jasa. Infrastruktur jalan yang lebih baik diharapkan dapat mendukung berbagai kegiatan masyarakat, termasuk perdagangan, pendidikan, kesehatan, serta sektor pertanian dan industri.

Tabel 2 berikut ini disajikan perkembangan panjang jalan di Kabupaten Buton Selatan selama tahun 2016-2022. Data-data ini bersumber dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Buton Selatan. Diketahui bahwa tahun 2019 dan 2020, total panjang jalan tercatat adalah 326,70 km, dengan 262,40 km merupakan kewenangan kabupaten dan 64,30 km merupakan kewenangan provinsi. Tidak ada perubahan panjang jalan selama dua tahun tersebut, yang menunjukkan tidak ada pembangunan baru atau perubahan signifikan dalam pengelolaan jalan di wilayah tersebut.

Tabel 2. Perkembangan Panjang Jalan Kabupaten Buton Selatan Tahun 2019-2022

No.	Panjang Jalan Menurut Kewenangan Pengelolaan (km)			Total
	Kabupaten	Provinsi	Negara/Nasional	
2019	262,40	64,30	-	326,70
2020	262,40	64,30	-	326,70
2021	244,68	57,47	-	302,15
2022	244,68	57,47	-	302,15

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Buton Selatan, (2023; 2022; 2021; dan 2020)

Pada tahun 2021 dan 2022 terjadi penurunan panjang jalan yang cukup signifikan menjadi 302,15 km, dengan rincian jalan kabupaten sepanjang 244,68 km dan jalan provinsi sepanjang 57,47 km. Hal ini menunjukkan total penurunan panjang jalan sebesar 24,55 km dibandingkan tahun sebelumnya.

Selanjut, pada Tabel 3 diketahui bahwa pada tahun 2019 dan 2020, panjang jalan dalam kondisi baik adalah 176,75 km, kondisi sedang 39,98 km, kondisi rusak 26,45 km, dan kondisi rusak berat 76,71 km. Tidak ada perubahan pada kedua tahun tersebut, yang menunjukkan bahwa tidak ada perbaikan atau peningkatan kondisi jalan yang signifikan selama periode tersebut.

Tabel 3. Perkembangan Kondisi Jalan Kabupaten Buton Selatan Tahun 2016-2022

No.	Kondisi Jalan			
	Baik	Sedang	Rusak	Rusak Berat
2019	176,75	39,98	26,45	76,71
2020	176,75	39,98	26,45	76,71
2021	196,56	0,69	48,68	56,23
2022	179,49	17,02	45,09	60,55

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Buton Selatan (2023; 2022; 2021; dan 2020)

Tabel 3 diatas juga diketahui bahwa pada tahun 2021 tercatat terjadi perubahan drastis pada sebaran kondisi jalan. Jalan baik bertambah menjadi 196,56 km (bertambah 19,81 km dibanding tahun sebelumnya). Jalan baik mengalami penurunan tajam menjadi hanya 0,69 km yang artinya banyak jalan dalam kondisi baik yang sedang dalam perbaikan atau bahkan mengalami penurunan hingga rusak. Jalan rusak bertambah menjadi 48,68 km (bertambah 22,23 km dari tahun 2020). Jalan rusak berat berkurang menjadi 56,23 km yang menandakan adanya perbaikan di beberapa ruas jalan yang sebelumnya dalam kondisi buruk. Perubahan ini menunjukkan adanya upaya peningkatan infrastruktur jalan, tetapi dengan kemungkinan redistribusi kualitas, di mana beberapa jalan yang sebelumnya dalam kondisi sedang memburuk menjadi rusak, sementara beberapa jalan rusak berat mengalami perbaikan.

Pada tahun 2022, kondisi jalan kembali mengalami pergeseran. Jalan baik menurun menjadi 179,49 km (berkurang 17,07 km dibanding tahun 2021). Jalan sedang meningkat menjadi 17,02 km, yang menunjukkan adanya perbaikan dari kategori jalan rusak menjadi kategori sedang. Jalan rusak sedikit menurun menjadi 45,09 km (berkurang 3,59 km). Jalan rusak berat meningkat menjadi 60,55 km, yang menunjukkan adanya ruas jalan yang kondisinya semakin parah.

3.2 Pembahasan

a. Perkembangan Pendapatan Daerah

Berdasarkan analisis terhadap sumber-sumber pendapatan Kabupaten Buton Selatan selama periode 2016–2022, terdapat beberapa poin utama yang dapat disimpulkan. Ketergantungan terhadap dana perimbangan masih sangat tinggi, terutama dari Dana Alokasi Umum (DAU), yang menjadi penyumbang terbesar dalam pendapatan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Buton Selatan belum sepenuhnya mandiri dalam pembiayaan pembangunan daerah. DAU memiliki peran penting dalam membiayai belanja operasional serta mendukung stabilitas keuangan daerah, namun ketergantungan ini memiliki dampak jangka panjang, seperti keterbatasan fleksibilitas fiskal akibat mekanisme transfer pusat yang telah ditentukan, risiko ketidakstabilan pendanaan akibat perubahan kebijakan fiskal nasional, serta kurangnya insentif bagi pemerintah daerah untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

PAD sendiri masih berkontribusi dalam porsi yang sangat kecil terhadap total pendapatan daerah, meskipun beberapa komponennya, seperti pajak daerah dan retribusi, menunjukkan tren peningkatan. Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah pada tahun 2016 hanya sebesar 1,35% (Rp7,66 miliar), kemudian meningkat pada tahun 2018 menjadi 4,49% (Rp25,86 miliar) atau mengalami kenaikan sekitar 3,13%. Puncak realisasi PAD terjadi pada tahun 2022 dengan kontribusi sebesar 4,82%, mengalami peningkatan sebesar 3,46% dibandingkan tahun 2016. Tren peningkatan ini menunjukkan adanya potensi bagi daerah untuk lebih mengembangkan PAD sebagai sumber utama pendanaan, meskipun upaya lebih lanjut masih diperlukan untuk memperluas basis pajak, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah.

Sementara itu, kontribusi dana perimbangan terhadap pendapatan daerah cenderung fluktuatif. Pada tahun 2016, kontribusinya mencapai 74,91%, mengalami peningkatan pada tahun 2017–2019, kemudian menurun pada tahun 2020–2021. Tahun 2022 menunjukkan sedikit perbaikan dengan kontribusi sebesar 83,79%, meskipun masih lebih rendah dibanding capaian tahun 2018 (84,09%) dan 2019 (85,95%). Di sisi lain, sumber pendapatan lain-lain menunjukkan tren yang relatif dinamis namun cenderung menurun. Pada tahun 2016, kontribusi dari sumber lain-lain mencapai 23,74%, menjadi yang tertinggi selama periode tersebut, namun mengalami penurunan pada tahun-tahun berikutnya. Tahun 2019 dan 2020 menunjukkan realisasi yang cukup baik, tetapi kemudian menurun menjadi hanya 11,39% pada tahun 2022.

Untuk mengurangi ketergantungan terhadap dana perimbangan, Kabupaten Buton Selatan perlu menerapkan berbagai strategi peningkatan PAD. Langkah-langkah ini dapat mencakup optimalisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi melalui peningkatan efektivitas pemungutan serta pengelolaan aset daerah yang lebih produktif. Diversifikasi sumber pendapatan daerah juga menjadi langkah penting, terutama dengan mendorong pengembangan sektor unggulan seperti pariwisata, perikanan, dan pertanian berbasis komoditas lokal. Selain itu, upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah dapat dilakukan melalui tata kelola keuangan yang lebih baik, efisiensi belanja, serta koordinasi yang lebih erat dengan pemerintah pusat dalam alokasi dana transfer.

Berangkat dari fakta empiris tersebut, maka agenda pembangunan Kabupaten Buton Selatan ke depan harus difokuskan pada upaya peningkatan PAD dengan mengeksplorasi potensi lain serta memaksimalkan sumber daya yang sudah ada. Untuk mewujudkan hal tersebut, prinsip keseimbangan lingkungan perlu diinternalisasikan dalam setiap rencana dan kebijakan pembangunan daerah agar dapat memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan. Dengan implementasi strategi yang tepat, Kabupaten Buton Selatan dapat meningkatkan kemandirian fiskal, mengurangi ketergantungan terhadap transfer pusat, serta membangun ekonomi daerah yang lebih kuat dan berdaya saing.

b. Perkembangan Infrastruktur Wilayah (Jalan)

Data menunjukkan bahwa tidak terjadi penambahan panjang jalan pada periode 2019–2022, bahkan terjadi penurunan setelah tahun 2020. Hal ini dapat berdampak pada aksesibilitas wilayah dan pembangunan ekonomi serta sosial masyarakat yang bergantung pada infrastruktur jalan. Untuk memastikan pertumbuhan wilayah yang berkelanjutan, diperlukan kebijakan yang lebih proaktif dalam pengelolaan, pemeliharaan, dan pengembangan infrastruktur jalan agar dapat terus mendukung mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi wilayah.

Beberapa faktor yang dapat menyebabkan berkurangnya panjang jalan antara lain: *Pertama*, reklasifikasi jalan. Beberapa jalan dapat mengalami perubahan status, misalnya dari jalan kabupaten menjadi jalan desa atau dari jalan provinsi menjadi jalan nasional, yang menyebabkan perubahan data pencatatan. *Kedua*, kerusakan dan penutupan jalan: Beberapa jalan dapat mengalami kerusakan parah dan tidak lagi dihitung sebagai bagian dari jaringan jalan yang berfungsi. *Ketiga*, pengembangan infrastruktur alternative. Jika terjadi perubahan kebijakan pengembangan transportasi, seperti pembangunan jalan tol atau jalan alternatif, beberapa jalan lama mungkin tidak lagi termasuk dalam kategori jalan

aktif dalam pencatatan. Keempat, faktor anggaran dan prioritas pembangunan. Jika terjadi kendala anggaran atau perubahan prioritas pengembangan infrastruktur, perbaikan dan perluasan jalan dapat tertunda atau tidak dilaksanakan. Fakta ini nampak berkesesuaian dengan data perkembangan keuangan daerah.

Dalam kaitannya dengan perubahan kondisi jalan, analisis ini menyajikan beberapa faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perubahan. Beberapa kemungkinan penyebab perubahan kondisi jalan antara lain: *Pertama*, peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur. Lonjakan jalan dalam kondisi baik pada tahun 2021 mengindikasikan adanya proyek peningkatan jalan. Namun, pada tahun 2022, penurunan panjang jalan dalam kategori baik mengindikasikan bahwa beberapa jalan tersebut mengalami kerusakan. *Kedua*, faktor cuaca dan lingkungan. Erosi, hujan lebat, atau bencana alam dapat mempercepat kerusakan jalan, yang dapat menjelaskan peningkatan jalan yang rusak parah pada tahun 2022. *Ketiga*, keterbatasan anggaran pemeliharaan. Jika anggaran pemeliharaan jalan tidak memadai, beberapa jalan yang telah diperbaiki dapat mengalami kerusakan lagi. *Keempat*, peningkatan beban kendaraan. Peningkatan aktivitas ekonomi dan mobilitas kendaraan berat dapat mempercepat kerusakan jalan, terutama jika infrastruktur tidak dirancang untuk menahan beban tinggi.

Perubahan kondisi jalan di daerah otonom baru seperti Kabupaten Buton Selatan selama periode 2021–2022 memiliki dampak langsung terhadap pembangunan ekonomi daerah. Dengan mempertimbangkan bukti-bukti empiris sebagaimana dilaporkan oleh Zahra et al., (2024); Alius & Anis (2024); Noviyanti & Putra (2023); Hayati (2022); Pakaila (2020); Ompusunggu (2018); dan Iek (2013) bahwa peningkatan kualitas jalan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan efisiensi transportasi dan aksesibilitas. Sebaliknya, penurunan kualitas jalan dapat menghambat aktivitas ekonomi dan menurunkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan dalam pemeliharaan dan peningkatan infrastruktur jalan untuk mendukung pembangunan ekonomi di daerah otonom baru seperti Kabupaten Buton Selatan.

4. Kesimpulan

Pendapatan daerah Kabupaten Buton Selatan selama kurun waktu 2016-2022 mengalami fluktuasi dengan dominasi sumber pendapatan dari dana perimbangan (transfer) yang memberikan kontribusi rata-rata sebesar 79,77%. Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih memiliki kontribusi yang relatif kecil yaitu sebesar 2,81%, meskipun menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun dengan puncaknya pada tahun 2022 sebesar 4,82%. Sumber pendapatan lain-lain yang sah cenderung mengalami tren penurunan sejak tahun 2016. Peningkatan PAD terutama dari pajak dan retribusi daerah menunjukkan potensi kemandirian fiskal yang perlu dioptimalkan untuk mengurangi ketergantungan terhadap transfer dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, strategi peningkatan PAD, efisiensi pengelolaan dana, dan diversifikasi sumber pendapatan merupakan langkah penting untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Perubahan panjang dan kondisi jalan di Kabupaten Buton Selatan pada periode 2019–2022 menunjukkan adanya dinamika dalam pengelolaan infrastruktur yang berdampak langsung pada pengembangan ekonomi daerah. Kestabilan panjang jalan tanpa pembangunan baru pada tahun 2019–2020 mencerminkan minimnya investasi infrastruktur yang dapat menghambat konektivitas dan pertumbuhan ekonomi. Penurunan panjang jalan pada tahun 2021–2022 sebesar 24,55 km berpotensi menurunkan aksesibilitas, meningkatkan biaya logistik, dan menghambat investasi. Sementara itu, perbaikan kualitas jalan pada tahun 2021 berdampak positif pada mobilitas dan distribusi barang, namun redistribusi kualitas jalan menyebabkan beberapa ruas mengalami penurunan kualitas. Pada tahun 2022, perbaikan jalan yang rusak parah menjadi tantangan besar karena dapat memperlambat kegiatan ekonomi, meningkatkan biaya transportasi, dan menurunkan daya saing usaha lokal. Secara keseluruhan, meskipun telah dilakukan upaya peningkatan infrastruktur jalan, tantangan dalam menjaga dan mendistribusikan kualitas jalan masih menjadi kendala bagi pengembangan ekonomi daerah. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih efektif dalam mengelola dan meningkatkan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di daerah otonom baru seperti Kabupaten Buton Selatan.

5. Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Kepala Badan Pusat Statistik yang telah menyediakan data sehingga memudahkan akses bagi para peneliti. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Rektor Universitas Mandala Waluya, Rektor Universitas Halu Oleo, Rektor Universitas Lakidende Unaaha, dan Rektor Universitas Muhammadiyah Buton atas dukungan, semangat, dan kesempatan yang diberikan dalam pelaksanaan penelitian kolaboratif ini.

Daftar Pustaka

- Alius, A. N., & Anis, A. (2024). Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Di Sumatra Barat. *Media Riset Ekonomi Pembangunan (MedREP)*, 1(1), 27-34. <https://doi.org/10.24036/medrep.v1i1.5>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Buton Selatan. (2023). *Kabupaten Buton Selatan dalam Angka 2023*. Batauga.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Buton Selatan. (2022). *Kabupaten Buton Selatan dalam Angka 2022*. Batauga.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Buton Selatan. (2021). *Kabupaten Buton Selatan dalam Angka 2022*. Batauga.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Buton Selatan. (2020). *Kabupaten Buton Selatan dalam Angka 2022*. Batauga.
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hasddin, Muthalib, A.A, Nggi, E., & Putera, A. (2022). *Metode analisis perencanaan dan pembangunan (paradigma penelitian, data kuantitatif-kualitatif, analisis kependudukan dan sosial, dan analisis ekonomi wilayah)*. Bandung: Media Sains Indonesia.
- Hayati, L. N. (2022). Analisis Pembangunan Infrastruktur Jalan Terhadap Perkembangan Pariwisata Kawasan Pinggiran Kota. *Journal Economics and Strategy*, 3(2), 1-11. <https://doi.org/10.36490/jes.v3i2.294>
- Iek, M. (2013). Analisis Dampak Pembangunan Jalan Terhadap Pertumbuhan Usaha Ekonomi Rakyat di Pedalaman May Barat, Provinsi Papua Barat (Studi Kasus di Distrik Ayamaru, Aitinyo dan Aifat). *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 6(1), 30-40. <https://media.neliti.com/media/publications/44299-EN-analisis-dampak-pembangunan-jalan-terhadap-pertumbuhan-usaha-ekonomi-rakyat-di-p.pdf>
- Mardiasmo. (2018). Analisis Kontribusi PAD terhadap Keuangan Daerah di Daerah Otonomi Baru. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Indonesia*, 8(2), 122-136. <https://10.21002/jepi.v8i2.1227>
- Mukhtar. (2013). *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Jakarta: GP Press Group.
- Noviyanti, N., & Putra, I.M. (2023). Dampak Perbaikan Jalan Terhadap Kondisi Social Ekonomi Masyarakat Desa Klumpang Kebun Kecamatan Hampan Perak Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Dharma Agung*, 31(3), 178-197. <http://dx.doi.org/10.46930/ojsuda.v31i3.3418>
- Ompusunggu, V.M. (2018). Dampak Pembangunan Infrastruktur Jalan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat di Desa Semangat Gunung, Kabupaten Karo. *Jupeko (Jurnal Pendidikan Ekonomi)*, 13(2), 18-26. <https://doi.org/10.29100/jupeko.v3i2.870>
- Pakaila, B. (2020). Pengaruh Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Jalan Kampung Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Sorong, *Jurnal Ekonomi Peluang*, 14(1), 77-91.
- Putra, R., & Hadi, S. (2020). Strategi Peningkatan Kemandirian Fiskal di Daerah Otonomi Baru. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 6(2), 200-215. <https://10.31289/ekombis.v6i2.2001>
- Rahmawati, L., Nugroho, D., & Suryani, T. (2021). Inovasi dan Administrasi Pajak Daerah dalam Meningkatkan PAD di Daerah Otonomi Baru. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, 10(1), 45-60. <https://10.25105/jebi.v10i1.2304>
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabeta.
- Sugiyono. (2010). *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Zahra, K., Manalu, R.H.R., Nabillah, R., & Dewi, P.K. (2024). Analisis Dampak Pembangunan Infrastruktur Jalan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kecamatan Medan Tembung. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(3), 1857–1866. <https://doi.org/10.47467/elmal.v5i3.1070>